

## ABSTRAK

KUHP merupakan aturan yang sudah berlaku lebih dari seratus tahun di Indonesia yang dirasa sudah ketinggalan jaman dan perlu untuk diamandemen kembali pemberlakuan pasalnya karena banyak pasal yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan konstitusi negara Indonesia, sebut saja satu pasal seperti pasal 505 KUHP yang mengatur tindak pidana bergelandangan yang mana bergelandangan dipidana dengan kurungan 3-6 bulan, dan dalam rumusan RKUHP pun pasal ini masih dipertahankan didalam pasal 432 RKUHP dengan mengganti pidana kurungan menjadi pidana denda, hal ini dirasa telah mengkriminalisasi gelandangan yang mana seharusnya dilindungi dan dipelihara oleh negara sesuai dengan pasal 34 ayat (1). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menelaah kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Spesifikasi yang digunakan bersifat deskriptif. Jenis bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer yang merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Dan bahan-bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*), yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan-bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (*law reform organization*), juga termasuk kamus hukum, artikel, majalah, jurnal, dan sebagainya. Serta bahan-bahan tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara normatif kualitatif. Mengingat hukum pidana memiliki asas *ultimum remedium* maka hendaklah dipergunakan sebagai jalan terakhir. Dan tindak pidana bergelandangan pun dapat memenuhi unsur dari *strafbaarfeit* secara formil dan dapat memenuhi unsur materil apabila masyarakat sudah menganggap bahwa Tindakan bergelandangan tersebut tidak patut untuk dilakukan dan dapat dipidana.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Bergelandangan, Kewajiban Negara**

## **ABSTRACT**

*The Criminal Code is a rule that has been in effect for more than one hundred years in Indonesia which is considered outdated and needs to be amended again because the article is not in accordance with the development of society and the constitution of the Indonesian state, let's call it one article such as article 505 of the Criminal Code which regulates actions homeless people who are homeless are sentenced to 3-6 months imprisonment, and in the formulation of the RKUHP this article is still maintained in Article 432 of the RKUHP by substituting imprisonment for fines, this is considered to have criminalized homeless people which should be protected and maintained by the state in accordance with Article 34 paragraph (1). This study uses a normative juridical approach, which is an approach that examines the legal norms relating to the legal issues under study. The specifications used are descriptive. The type of material used is primary legal material which is data obtained from legal materials that have permanent and binding legal force and are directly related to the problem under investigation. And secondary legal materials (secondary sources or authorities), which are materials that are closely related to primary legal materials, such as books written by experts, by various law formation committees (law reform organizations), also included legal dictionaries, articles, magazines, journals, and so on. As well as tertiary materials, i.e. materials that provide information about primary legal materials and tertiary legal materials. Data collected in this study were analyzed normatively qualitatively. Considering that criminal law has the principle of ultimum remedium, it should be used as a last resort. And the crime of homelessness can fulfill the elements of strafbaarfeit in a formal manner and can fulfill the material element if the community considers that the homelessness act is inappropriate and can be punished.*

**Keywords : Criminal Act, Mosey, State Obligation**